



PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG

RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI LAMPUNG

 @desdmlampung

 <https://esdm.lampungprov.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2023. sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ini memuat Latar Belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu yang berupa capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan Program dan kegiatan, telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Tahun Anggaran 2023.

Bandar Lampung, Januari 2023
Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL



Drs. HERY SADLI, M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19690719 199003 1 005

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | 1 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu | 6 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 6 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 12 |
| 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | 12 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 13 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat | 20 |
| Bab III Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah | 26 |
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional | 26 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 27 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 28 |
| Bab IV Tujuan dan Sasaran | 41 |
| 4.1 Matriks Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 | 41 |
| Bab V Penutup | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Proses penyusunan Rencana Kerja meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Rencana Kerja; (2) Penyusunan rancangan Rencana Kerja; (3) Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja; dan (4) Penetapan Rencana Kerja.

Rencana Kerja merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang disusun per tahun selama kurun waktu lima tahun dan dibuat pada awal tahun. Rencana Kerja memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang strategis. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah melalui Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

I.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2023 berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- 
- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tahun Energi;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

- 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 25. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
 26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung adalah merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh dana APBDP Provinsi Lampung Tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, merupakan rencana pembangunan tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Sebagai pedoman kerja dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perangkat Daerah serta kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2023.
2. Sebagai pedoman kerja dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023.
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Arah Kebijakan Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
4. Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2019-2024 yang memuat Program/Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Untuk memahami lebih jelas mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, maka uraian-uraian yang terdapat pada Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun anggaran 2023.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2023 yang didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 serta Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dievaluasi pada akhir tahun anggaran dan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Renja tahun 2023 sebagaimana terlampir.

| Tabel T-C.29. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
| Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 | | | | | | | | | | |
| Provinsi Lampung | | | | | | | | | | |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan 2022 (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) | Perkiraan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= 7/6 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI | | | | | | | | | |
| 3.29 | BIDANG URUSAN | | | | | | | | | |
| 3.29.01.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.29.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.29.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 18 Dokumen | - | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 3.29.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Kali | 1 Kali | 100% |
| 3.29.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | - | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | 6 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| 3.29.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.29.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan | 1582 Org/bulan | - | 1582 Org/Bln | 1582 Org/Bln | 100% | 1582 Org/Bln | 12 Bulan | 100% |
| 3.29.01.1.02.07 | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan | 6 Laporan | - | - | - | - | 6 Laporan | - | - |
| 3.29.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - |
| 3.29.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | - | - | - | - | 1 Dokumen | - | - |
| 3.29.01.1.05.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | - | - | - | - | 1 Dokumen | - | - |
| 3.29.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan Peraturan yang ada | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.29.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 orang | - | 2 Orang | 2 Orang | 100% | 10 Orang | 2 Orang | 100% |





| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|---|-------------|-------------|------|----------------|----------------|--------|
| 3.29.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Umum sesuai dengan Peraturan yang ada | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.29.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga dan Listrik yang di butuhkan | 25 Paket | - | 15 Paket | 15 Paket | 100% | 25 Buah | 19 Buah | 100% |
| 3.29.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | 630 Paket | - | 460 Paket | 460 Paket | 100% | 250.000 Lembar | 212.500 Lembar | 92,40% |
| 3.29.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Dokumen | - | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 100% | 1 buku | 1 buku | 100% |
| 3.29.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan | 2347 Paket | - | 2347 Paket | 2347 Paket | 100% | 2347 Buah | 2347 Buah | 100% |
| 3.29.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | 451 Laporan | - | 451 Laporan | 451 Laporan | 100% | 415 kotak | 415 kotak | 100% |
| 3.29.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 128 Laporan | - | 38 Laporan | 38 Laporan | 100% | 128 Kali | 9 Kali | 100% |
| 3.29.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 14 Unit | 14 Unit | 100% |
| 3.29.01.1.07.05 | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebeleur yang disediakan | 7 Paket | - | 7 Paket | 7 Paket | 100% | 7 unit | 7 unit | 100% |
| 3.29.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 7 Unit | - | 7 Paket | 7 Paket | 100% | 100% | 7 unit | 100% |
| 3.29.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.29.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 1 | 100% |
| 3.29.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 36 Laporan | - | 36 Laporan | 36 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 | 100% |
| 3.29.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 55 Unit | 55 Unit | 100% |
| 3.29.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 10 Unit | - | 5 Unit | 5 Unit | 100% | 8 Unit | 5 Unit | 100% |
| 3.29.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 88 Unit | - | 49 Unit | 49 Unit | 100% | 12 Bulan | 49 Unit | 100% |
| 3.29.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 2 Unit | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 8 Unit | 1 Unit | 100% |
| 3.29.01.2 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLGIAN | Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian | 61,00% | - | 3,2% | 3,2% | 100% | 100% | 1 | 100% |
| 3.29.01.2.01 | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Persentase Perusahaan yang Pemanfaat Air Tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah | 67,5% | - | 2,5% | 2,5% | 100% | 4 Kab/Kota | 4 Lokasi | 100% |
| 3.29.01.2.01.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam | 44 Dokumen | - | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 4 Lokasi | 100% |
| 3.29.01.2.01.02 | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah | Jumlah Dokumen Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi | 4 Dokumen | - | - | - | - | 4 Lokasi | - | - |



| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 3.29.01.2.03 | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Persentase Progres Penyusunan Pergub tentang NPA | 45% | - | 1,4% | 1,4% | 100% | 4 Kab/Kota | 4 Lokasi | 100% |
| 3.29.01.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Jumlah Laporan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan, serta terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah. | 30 Laporan | - | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% | 4 Kab/Kota | 4 Kab/Kota | 100% |
| 3.29.01.3 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase Peningkatan Pengelolaan Mineral dan Batubara | 50% | - | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.29.03.1.01 | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 7 dokumen | - | 7 dokumen | 7 dokumen | 100% | 7 dokumen | 7 dokumen | 100% |
| 3.29.03.1.01.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut samapai dengan 12 mil yang Terkumpul dan Terolah | 7 dokumen | - | 7 dokumen | 7 dokumen | 100% | 7 dokumen | 7 dokumen | 100% |
| 3.29.03.1.01 | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 22 Laporan | - | 22 Perusahaan | 22 Perusahaan | 100% | 22 Perusahaan | 22 Perusahaan | 100% |
| 3.29.03.1.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri | 11 Laporan | - | 11 Perusahaan | 11 Perusahaan | 100% | 11 Perusahaan | 11 Perusahaan | 100% |
| 3.29.01.3.03.04 | Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri | 11 Laporan | - | 11 Perusahaan | 11 Perusahaan | 100% | 11 Perusahaan | 10 Perusahaan | 90,90% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------|----------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 3.29.01.5 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase Bauran Energi Daerah | 33,5% | - | 30,1% | 30,1% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.29.01.5.03 | Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Persentase Badan Usaha yang diawasi sesuai dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per hari | 8% | - | 4% | 4% | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 3.29.01.5.03.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | 24 Laporan | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 3.29.01.5.04 | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.29.05.1.04.01 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi | Jumlah Dokumen Data guna Penyusunan Neraca Energi | 3 Dokumen | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 3.29.05.1.04.03 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi | Jumlah Dokumen Data Potensi Bioenergi | 300 Orang | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 3.29.05.1.04.04 | Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi | Jumlah fasilitas milik Pemerintah yang akan dilakukan efisiensi Energi Listrik | 2 Unit | - | 2 Unit | 2 Unit | 100% | 2 Unit | 2 Unit | 100% |
| 3.29.01.6 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Persentase Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi | 80% | - | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.29.01.6.01 | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 80% | - | 40% | 40% | 100% | 6 Kali | 6 Kali | 100% |
| 3.29.01.6.01.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 8 Laporan | - | 6 Laporan | 6 Laporan | 100% | 6 Kali | 6 Kali | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|---|------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 3.29.01.6.02 | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Persentase Izin Operasi yang terawasi se Provinsi Lampung | 80% | - | 40% | 40% | 100% | 12 Kali | 12 Kali | 100% |
| 3.29.01.6.02.02 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 12 Laporan | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Kali | 11 Kali | 91,66% |
| 3.29.01.6.05 | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | Persentase Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun | 80% | - | 40% | 40% | 100% | 7 dokumen | 7 dokumen | 100% |
| 3.29.01.6.05.2 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | 7 Laporan | - | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% | 7 dokumen | 7 dokumen | 100% |
| 3.29.01.6.06 | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan yang teranggarkan | 80% | - | 40% | 40% | 100% | 13 Kab/Kota | 13 Kabupaten | 100% |
| 3.29.01.6.06.2 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | 3 Unit | - | 5 Unit | 5 Unit | 100% | 13 Kab/Kota | 0 Lokasi | 0% |
| 3.29.01.6.06.4 | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 13 Laporan | - | 13 Laporan | 13 Laporan | 100% | 13 Kab/Kota | 13 Kabupaten | 100% |
| 3.29.01.6.06.7 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah dokumen Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan | 13 Dokumen | - | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 100% | 13 Kab/Kota | 13 Kabupaten | 100% |

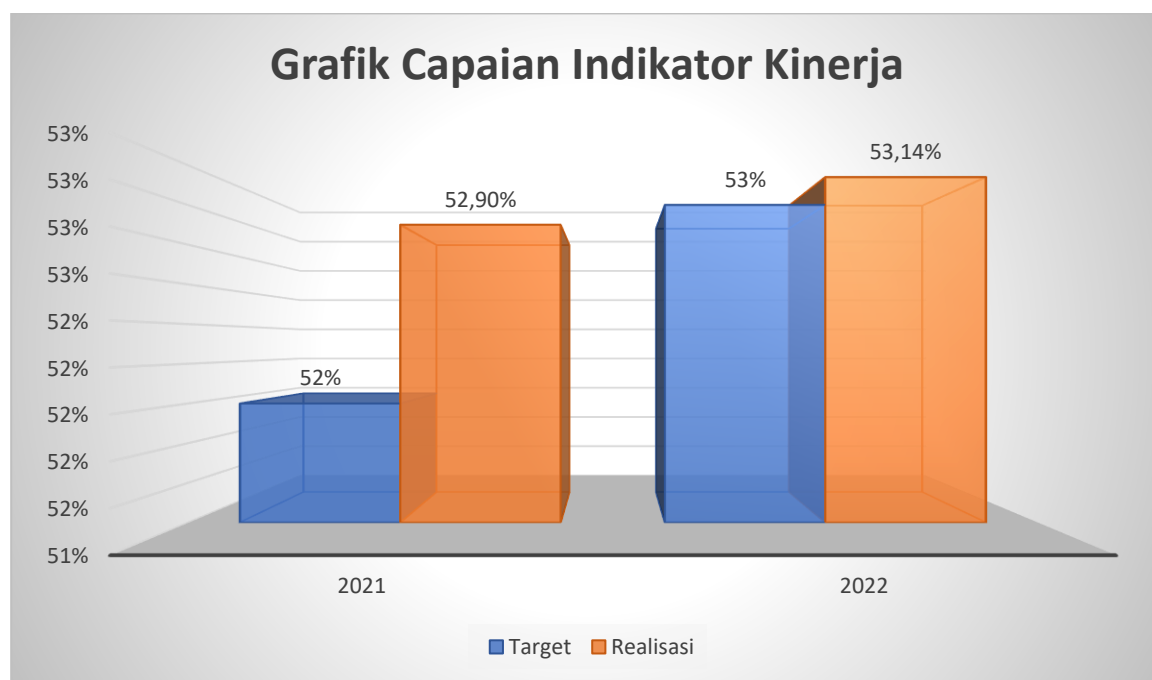


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada sasaran strategis dan Indikator-indikator yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama dalam rangka untuk Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung.

Gambar 2.1


Grafik Capaian Indikator Kinerja T.A 2021-2022



2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tidak terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain:

1. Masih ada beberapa wilayah yang belum teraliri listrik;
2. Potensi energi baru terbarukan di Provinsi Lampung cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi panas bumi masih mengalami kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan dan kurangnya dukungan infrastruktur;
3. Masih rendahnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB;
4. Rendahnya kontribusi sektor LGA terhadap PDRB;

- 
5. Selama ini anggapan sebagian masyarakat terhadap kegiatan penambangan, dianggap merusak lingkungan. Padahal sebenarnya kegiatan usaha pertambangan hanya merubah bentang alam sesuai peruntukannya, dan bahkan hal ini selalu diisyaratkan pada saat pengajuan izin usaha pertambangan dan hal ini tercantum pada RKL/UPL dan amdal sebelum kegiatan penambangan dilaksanakan;
 6. Kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) masih terjadi;
 7. Jumlah dan debit mata air di Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan selama beberapa dekade ini seiring dengan banyak berubahnya fungsi lahan di daerah resapan;
 8. Masih terdapat daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, untuk itu perlu dilakukan kegiatan pengeboran air tanah dalam rangka mendorong pengembangan wilayah tertinggal;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Lampung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------|---|----------------|---------------------------|---|------------|---|----------------|---------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 0000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 0000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI | | | | 20.838.982.157,90 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI | | | | 20.838.982.157,90 | |
| | BIDANG URUSAN | | | | | BIDANG URUSAN | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan yang ada | 100% | 16.885.872.157,90 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan yang ada | 100% | 16.885.872.157,90 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | 100% | 167.356.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | 100% | 167.356.000,00 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas ESDM | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 18 Dokumen | 16.126.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas ESDM | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 18 Dokumen | 16.126.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas ESDM | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 116.230.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas ESDM | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 116.230.000,00 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 35.000.000,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 35.000.000,00 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah | 100% | 13.868.099.842,90 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah | 100% | 13.868.099.842,90 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas ESDM | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1582 Org/bulan | 13.857.979.842,90 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas ESDM | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1582 Org/bulan | 13.857.979.842,90 | |
| | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Dinas ESDM | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan | 6 Laporan | 10.120.000,00 | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Dinas ESDM | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan | 6 Laporan | 10.120.000,00 | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia | 100% | 50.000.000,00 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia | 100% | 50.000.000,00 | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 15.000.000,00 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | 35.000.000,00 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | 35.000.000,00 | |





RENCANA KERJA TAHUN 2023

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|-------------|-------------------------|---|------------|--|-------------|-------------------------|--|
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang ada | 100% | 100.000.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang ada | 100% | 100.000.000,00 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dinas ESDM | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 orang | 100.000.000,00 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dinas ESDM | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 orang | 100.000.000,00 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase Layanan Administrasi Umum sesuai dengan peraturan yang ada | 100% | 1.192.597.400,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase Layanan Administrasi Umum sesuai dengan peraturan yang ada | 100% | 1.192.597.400,00 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dinas ESDM | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 25 Paket | 15.884.000,00 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dinas ESDM | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 25 Paket | 15.884.000,00 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dinas ESDM | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 630 Paket | 46.000.000,00 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dinas ESDM | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 630 Paket | 46.000.000,00 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dinas ESDM | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Dokumen | 0,00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dinas ESDM | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Dinas ESDM | Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan | 2347 Paket | 168.432.000,00 | Penyediaan Bahan/Material | Dinas ESDM | Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan | 2347 Paket | 168.432.000,00 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 451 Laporan | 25.775.000,00 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 451 Laporan | 25.775.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 128 Laporan | 936.506.400,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 128 Laporan | 936.506.400,00 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 221.480.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 221.480.000,00 | |
| | Pengadaan mebel | Dinas ESDM | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 7 Paket | 114.214.000,00 | Pengadaan mebel | Dinas ESDM | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 7 Paket | 114.214.000,00 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas ESDM | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 7 Unit | 107.266.000,00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas ESDM | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 7 Unit | 107.266.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana | 100% | 724.833.915,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana | 100% | 724.833.915,00 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas ESDM | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | 197.558.915,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas ESDM | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | 197.558.915,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 36 Laporan | 527.275.000,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 36 Laporan | 527.275.000,00 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 561.505.000,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 561.505.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas ESDM | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 218.080.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas ESDM | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 218.080.000,00 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas ESDM | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara | 88 Unit | 28.425.000,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas ESDM | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara | 88 Unit | 28.425.000,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dinas ESDM | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 Unit | 315.000.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dinas ESDM | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 Unit | 315.000.000,00 | |



| II | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN | | Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian | 61,00% | 600.000.000,00 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN | | Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian | 61,00% | 600.000.000,00 |
|-----|---|------------------|---|------------|----------------|---|------------------|---|------------|----------------|
| | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | Persentase Perusahaan yang Pemanfaat Air tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah | 67,5% | 480.000.000,00 | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | Persentase Perusahaan yang Pemanfaat Air tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah | 67,5% | 480.000.000,00 |
| | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam | 44 Dokumen | 261.500.000,00 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam | 44 Dokumen | 261.500.000,00 |
| | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi | 4 Dokumen | 218.500.000,00 | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi | 4 Dokumen | 218.500.000,00 |
| | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | Persentase Progres Penyusunan Pergub tentang NPA | 45% | 120.000.000,00 | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | Persentase Progres Penyusunan Pergub tentang NPA | 45% | 120.000.000,00 |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 30 Laporan | 120.000.000,00 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 30 Laporan | 120.000.000,00 |
| III | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara | 50% | 519.110.000,00 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara | 50% | 519.110.000,00 |
| | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 7 dokumen | 140.000.000,00 | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 7 dokumen | 140.000.000,00 |
| | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | 7 dokumen | 140.000.000,00 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | 7 dokumen | 140.000.000,00 |



| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|---|--------------|-------------------------|--|------------------|---|--------------|-------------------------|
| | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | | Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 22 Laporan | 379.110.000,00 | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | | Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 22 Laporan | 379.110.000,00 |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 11 Laporan | 189.110.000,00 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 11 Laporan | 189.110.000,00 |
| | Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 11 Laporan | 190.000.000,00 | Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 11 Laporan | 190.000.000,00 |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | | Persentase Bauran Energi Daerah | 33,5% | 1.659.790.000,00 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | | Persentase Bauran Energi Daerah | 33,5% | 1.659.790.000,00 |
| | Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | | Persentase Badan Usaha yang diawasi sesuai dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per hari | 8% | 309.000.000,00 | Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | | Persentase Badan Usaha yang diawasi sesuai dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per hari | 8% | 309.000.000,00 |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | 24 Laporan | 309.000.000,00 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | 24 Laporan | 309.000.000,00 |
| | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | | Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | 100% | 1.350.790.000,00 | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | | Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | 100% | 1.350.790.000,00 |
| | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen Data guna Penyusunan Neraca Energi Daerah | 3 Dokumen | 405.000.000,00 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen Data guna Penyusunan Neraca Energi Daerah | 3 Dokumen | 405.000.000,00 |
| | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi | Provinsi Lampung | Jumlah Orang yang menerima manfaat dan teknologi Konservasi Energi | 300 Orang | 795.000.000,00 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi | Provinsi Lampung | Jumlah Orang yang menerima manfaat dan teknologi Konservasi Energi | 300 Orang | 795.000.000,00 |
| | Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi | Provinsi Lampung | Jumlah Penerima Manfaat Fasilitas/Gedung milik Pemerintah yang dilakukan Efisiensi Energi Listrik | 2 Unit | 150.790.000,00 | Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi | Provinsi Lampung | Jumlah Penerima Manfaat Fasilitas/Gedung milik Pemerintah yang dilakukan Efisiensi Energi Listrik | 2 Unit | 150.790.000,00 |



| V | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | Persentase Infrastruktur Ketenagalistrkan yang terealisasi | 80% | 1.174.210.000,00 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | Persentase Infrastruktur Ketenagalistrkan yang terealisasi | 80% | 1.174.210.000,00 |
|---|---|------------------|--|------------|------------------|---|------------------|--|------------|------------------|
| | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang terawasi | 80% | 250.000.000,00 | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang terawasi | 80% | 250.000.000,00 |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 8 Laporan | 250.000.000,00 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 8 Laporan | 250.000.000,00 |
| | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | Persentase Izin Operasi yang terawasi se Provinsi Lampung | 80% | 100.000.000,00 | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | Persentase Izin Operasi yang terawasi se Provinsi Lampung | 80% | 100.000.000,00 |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 12 Laporan | 100.000.000,00 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 12 Laporan | 100.000.000,00 |
| | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | | Persentase Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun | 80% | 474.210.000,00 | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | | Persentase Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun | 80% | 474.210.000,00 |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | 7 Laporan | 474.210.000,00 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | 7 Laporan | 474.210.000,00 |



| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|------------|--------------------------|---|------------------|---|------------|--------------------------|--|
| Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | | Persentase Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun | 80% | 350.000.000,00 | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | | Persentase Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun | 80% | 350.000.000,00 | |
| Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Provinsi Lampung | Jumlah Sarana yang terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | 3 Unit | 0,00 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Provinsi Lampung | Jumlah Sarana yang terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | 3 Unit | 0,00 | |
| Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | 13 Laporan | 100.000.000,00 | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | 13 Laporan | 100.000.000,00 | |
| Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen yang terkumpul terkait Data Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | 13 Dokumen | 250.000.000,00 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen yang terkumpul terkait Data Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | 13 Dokumen | 250.000.000,00 | |
| Jumlah Pagu | | | | 20.838.982.157,90 | Jumlah Pagu | | | | 20.838.982.157,90 | |



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung menyusun usulan program / kegiatan tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan rapat musrembang tingkat kabupaten/kota. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dapat dilihat pada. Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel 2.4 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Provinsi Lampung

| Nama Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung | | | | | |
|---|---|------------|--|--------------------|---------|
| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | |
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI | | | | |
| | BIDANG URUSAN | | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan yang ada | 100% | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | 100% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas ESDM | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 18 Dokumen | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas ESDM | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah | 100% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas ESDM | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1582 Org/bulan | |
| | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Dinas ESDM | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan | 6 Laporan | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia | 100% | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang ada | 100% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dinas ESDM | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 orang | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase Layanan Administrasi Umum sesuai dengan peraturan yang ada | 100% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dinas ESDM | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 25 Paket | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dinas ESDM | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 630 Paket | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dinas ESDM | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Dokumen | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Dinas ESDM | Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan | 2347 Paket | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 451 Laporan | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 128 Laporan | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | |
| | Pengadaan mebel | Dinas ESDM | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 7 Paket | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas ESDM | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | 7 Unit | |

| | | | | | |
|------------|---|------------------|--|------------------|--|
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana | 100% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas ESDM | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas ESDM | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 36 Laporan | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas ESDM | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas ESDM | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara | 88 Unit | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dinas ESDM | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 Unit | |
| II | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN | | Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian | 61,00% | |
| | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | Persentase Perusahaan yang Pemanfaat Air tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah | 67,5% | |
| | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam | 44 Dokumen | |
| | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi | 4 Dokumen | |
| | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | Persentase Progres Penyusunan Pergub tentang NPA | 45% | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 30 Laporan | |
| III | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara | 50% | |
| | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 7 dokumen | |
| | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | 7 dokumen | |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------|---|--------------|--|
| | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | | Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 22 Laporan | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 11 Laporan | |
| | Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 11 Laporan | |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | | Persentase Bauran Energi Daerah | 33,5% | |
| | Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | | Persentase Badan Usaha yang diawasi sesuai dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per hari | 8% | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | 24 Laporan | |

| | | | | | |
|----------|---|------------------|--|-------------|--|
| | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | | Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | 100% | |
| | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen Data guna Penyusunan Neraca Energi Daerah | 3 Dokumen | |
| | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi | Provinsi Lampung | Jumlah Orang yang menerima manfaat dan teknologi Konservasi Energi | 300 Orang | |
| | Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi | Provinsi Lampung | Jumlah Penerima Manfaat Fasilitas/Gedung milik Pemerintah yang dilakukan Efisiensi Energi Listrik | 2 Unit | |
| V | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | Persentase Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi | 80% | |
| | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang terawasi | 80% | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 8 Laporan | |
| | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | Persentase Izin Operasi yang terawasi se Provinsi Lampung | 80% | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 12 Laporan | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|--|------------|--|
| | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | | Persentase Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun | 80% | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | 7 Laporan | |
| | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan | | Persentase Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun | 80% | |
| | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan | Provinsi Lampung | Jumlah Sarana yang terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | 3 Unit | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan | Provinsi Lampung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan | 13 Laporan | |
| | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan | Provinsi Lampung | Jumlah Dokumen yang terkumpul terkait Data Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | 13 Dokumen | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

2.6. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai Instansi yang memiliki tugas melakukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung selalu mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung yaitu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 serta kebijakan yang termuat dalam dokumen penyusunan perencanaan yang setiap tahun diterbitkan oleh Pemerintah yang menekankan pada 7 agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024, yaitu :



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam membuat dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif, teknokratik, politik serta *Top down* dan *Bottom up*. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah yang menurut kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pola Working Plan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan yang disusun dari tahapan yang memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down* ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka menjaga sinergitas perencanaan pembangunan perlu dicermati kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”



Selain RKP 2023 penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada level provinsi yaitu RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023. Untuk pencapaian keselarasan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2023, serta selaras dengan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang bertajuk : “MEMANTAPKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN KESEHATAN SERTA PENINGKATAN SDM BERKUALITAS,”

2.7. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian Sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Adapun tujuan pembangunan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung adalah “***Terwujudnya Ketahanan dan Kemadirian Energi Menuju Lampung Berjaya***”.

Sasaran Pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung akan di fokuskan pada:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|----|--|----------------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Terwujudnya Ketahanan dan Kemadirian Energi Menuju Lampung Berjaya | Rasio Dusun Berlistrik (%) | 1. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung | Rasio Dusun Berlistrik |

2.8. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya Program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Lebih lanjut, penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan pada pada tahun 2023 pada dasarnya merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang direncanakan untuk periode Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Regulasi dan Kebijakan Pembangunan ESDM

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Penyediaan Bahan/Material
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUPG) Dinas ESDM Provinsi Lampung

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
2. Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah
3. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan zona Konservasi air tanah pada cekungan air tanah

b. Penatausahaan izin Pengeboran, izin Pemakaian dan izin Pengusahaan air tanah

1. Penetapan prosedur dan persyaratan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah
2. Penyusunan rekomendasi layanan perizinan dan informasi izin pengeboran, izin penggalian, dan izin pengusahaan air tanah
3. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan, pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah

c. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

1. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah
2. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah

III. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

a. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

b. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
2. Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut

IV. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

a. Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

b. Penatausahaan Izin Pemanfaatan langsung Panas Bumi lintas daerah Kab/Kota dala 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan kearah perairan kepulauan

1. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan kearah perairan kepulauan
2. Penetapan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan kearah perairan kepulauan

3. Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan ke arah perairan kepulauan
4. Inventarisasi potensi sumber daya alam lokal dalam pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan

c. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
2. Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
3. Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi

d. Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi

V. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

a. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi


1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

b. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

c. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri

1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri



d. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan

1. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan
2. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dijabarkan pada tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Lampung

| Nama Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI | | | | 20.838.982.157,90 | APBD | | | 24.639.710.150,00 |
| 3.29 | BIDANG URUSAN | | | | | | | | |
| 3.29.01.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan yang ada | | 100% | 16.885.872.157,90 | APBD | | 100% | 17.580.000.150,00 |
| 3.29.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusunn | | 100% | 167.356.000,00 | APBD | | 100% | 275.000.000,00 |
| 3.29.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas ESDM | 12 Dokumen | 16.126.000,00 | APBD | | 22 Dokumen | 125.000.000,00 |
| 3.29.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas ESDM | 3 Dokumen | 116.230.000,00 | APBD | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 |
| 3.29.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas ESDM | 6 Laporan | 35.000.000,00 | APBD | | 3 dokumen | 50.000.000,00 |
| 3.29.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah | | 100% | 13.868.099.842,90 | APBD | | 100% | 13.607.117.685,00 |
| 3.29.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas ESDM | 1582 Org/bulan | 13.857.979.842,90 | APBD | | 1582 Orang/Bulan | 13.577.117.685,00 |
| 3.29.01.1.02.07 | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan | Dinas ESDM | 6 Laporan | 10.120.000,00 | APBD | | 6 Laporan | 30.000.000,00 |
| 3.29.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia | | 100% | 50.000.000,00 | APBD | | 100% | 78.369.550,00 |
| 3.29.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas ESDM | 2 Laporan | 15.000.000,00 | APBD | | 2 Laporan | 25.000.000,00 |
| 3.29.01.1.05.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas ESDM | 7 Laporan | 35.000.000,00 | APBD | | 7 Laporan | 53.369.550,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|-------------------------|
| 3.29.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang ada | | 100% | 100.000.000,00 | APBD | | 100% | 150.000.000,00 |
| 3.29.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Dinas ESDM | 20 orang | 100.000.000,00 | APBD | | 20 Orang | 150.000.000,00 |
| 3.29.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Umum sesuai dengan peraturan yang ada | | 100% | 1.192.597.400,00 | APBD | | 100% | 1.302.052.915,00 |
| 3.29.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | Dinas ESDM | 19 Paket | 15.884.000,00 | APBD | | 30 Paket | 40.884.000,00 |
| 3.29.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Dinas ESDM | 460 Paket | 46.000.000,00 | APBD | | 790 Paket | 97.500.000,00 |
| 3.29.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dinas ESDM | 1 Dokumen | 0,00 | APBD | | 125 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 3.29.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan | Dinas ESDM | 2347 Paket | 168.432.000,00 | APBD | | 2347 Paket | 202.500.000,00 |
| 3.29.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Dinas ESDM | 415 Laporan | 25.775.000,00 | APBD | | 451 Laporan | 35.000.000,00 |
| 3.29.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas ESDM | 148 Laporan | 936.506.400,00 | APBD | | 148 Laporan | 901.168.915,00 |
| 3.29.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100% | 221.480.000,00 | APBD | | 100% | 150.000.000,00 |
| 3.29.01.1.07.05 | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | Dinas ESDM | 31 Paket | 114.214.000,00 | APBD | | 7 unit | 50.000.000,00 |
| 3.29.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | Dinas ESDM | 31 Unit | 107.266.000,00 | APBD | | 8 unit | 100.000.000,00 |
| 3.29.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | | 100% | 724.833.915,00 | APBD | | 100% | 733.060.000,00 |
| 3.29.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Dinas ESDM | 12 Laporan | 197.558.915,00 | APBD | | 12 laporan | 250.800.000,00 |
| 3.29.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Dinas ESDM | 36 Laporan | 527.275.000,00 | APBD | | 36 laporan | 482.260.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------|---------------|-----------------------|-------------|--|-------------|-------------------------|
| 3.29.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100% | 561.505.000,00 | APBD | | 100% | 1.284.400.000,00 |
| 3.29.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dinas ESDM | 6 Unit | 218.080.000,00 | APBD | | 12 Unit | 859.400.000,00 |
| 3.29.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara | Dinas ESDM | 88 Unit | 28.425.000,00 | APBD | | 105 unit | 75.000.000,00 |
| 3.29.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Dinas ESDM | 1 Unit | 315.000.000,00 | APBD | | 3 Unit | 350.000.000,00 |
| 3.29.01.2 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN | Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian | | 56,25% | 600.000.000,00 | APBD | | 100% | 1.070.000.000,00 |
| 3.29.01.2.01 | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Persentase Perusahaan yang Pemanfaat Air tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah | | 67,5% | 480.000.000,00 | APBD | | 100% | 820.000.000,00 |
| 3.29.01.2.01.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Jumlah Dokumen terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam | Provinsi Lampung | 20 Dokumen | 261.500.000,00 | APBD | | 44 Dokumen | 220.000.000,00 |
| 3.29.01.2.01.02 | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah | Jumlah Dokumen Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | 1 Dokumen | 218.500.000,00 | APBD | | 4 Dokumen | 600.000.000,00 |
| 3.29.01.2.03 | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Persentase Progres Penyusunan Pergub tentang NPA | | 45% | 120.000.000,00 | APBD | | 100% | 250.000.000,00 |
| 3.29.01.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | 10 Laporan | 120.000.000,00 | APBD | | 30 Laporan | 250.000.000,00 |

| 3.29.01.3 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara | | 100% | 519.110.000,00 | APBD | | 60% | 750.000.000,00 |
|-----------------|--|---|------------------|------------|----------------|------|--|------------|----------------|
| 3.29.03.1.01 | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | 7 dokumen | 140.000.000,00 | APBD | | 7 dokumen | 315.000.000,00 |
| 3.29.03.1.01.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Provinsi Lampung | 7 dokumen | 140.000.000,00 | APBD | | 7 dokumen | 315.000.000,00 |
| 3.29.03.1.01 | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | | 22 Laporan | 379.110.000,00 | APBD | | 22 Laporan | 435.000.000,00 |
| 3.29.03.1.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Provinsi Lampung | 11 Laporan | 189.110.000,00 | APBD | | 11 Laporan | 210.000.000,00 |
| 3.29.01.3.03.04 | Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Provinsi Lampung | 11 Laporan | 190.000.000,00 | APBD | | 11 Laporan | 225.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|--|--------------|-------------------------|
| 3.29.01.5 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase Bauran Energi Daerah | | 100% | 1.659.790.000,00 | APBD | | 34,8% | 3.025.000.000,00 |
| 3.29.01.5.03 | Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Persentase Badan Usaha yang diawasi sesuai dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per hari | | 8% | 309.000.000,00 | APBD | | 10% | 400.000.000,00 |
| 3.29.01.5.03.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Provinsi Lampung | 12 Laporan | 309.000.000,00 | APBD | | 30 Laporan | 400.000.000,00 |
| 3.29.01.5.04 | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | | 100% | 1.350.790.000,00 | APBD | | 100% | 2.625.000.000,00 |
| 3.29.05.1.04.01 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi | Jumlah Dokumen Data guna Penyusunan Neraca Energi Daerah | Provinsi Lampung | 2 Dokumen | 405.000.000,00 | APBD | | 5 Dokumen | 650.000.000,00 |
| 3.29.05.1.04.03 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi | Jumlah Orang yang menerima manfaat dan teknologi Konservasi Energi | Provinsi Lampung | 300 Orang | 795.000.000,00 | APBD | | 300 Orang | 1.325.000.000,00 |
| 3.29.05.1.04.04 | Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi | Jumlah Penerima Manfaat Fasilitas/Gedung milik Pemerintah yang dilakukan Efisiensi Energi Listrik | Provinsi Lampung | 2 Unit | 150.790.000,00 | APBD | | 4Unit | 650.000.000,00 |
| 3.29.01.6 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Persentase Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi | | 80% | 1.174.210.000,00 | APBD | | 100% | 2.214.710.000,00 |
| 3.29.01.6.01 | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang terawasi | | 80% | 250.000.000,00 | APBD | | 100% | 350.000.000,00 |
| 3.29.01.6.01.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | 21 Laporan | 250.000.000,00 | APBD | | 8 Laporan | 350.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|--------------------|--------------------------|------|--|--------------------|--------------------------|
| 3.29.01.6.02 | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Persentase Izin Operasi yang terawasi se Provinsi Lampung | | 80% | 100.000.000,00 | APBD | | 100% | 150.000.000,00 |
| 3.29.01.6.02.02 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | 12 Laporan | 100.000.000,00 | APBD | | 12 Laporan | 150.000.000,00 |
| 3.29.01.6.05 | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | Persentase Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun | | 80% | 474.210.000,00 | APBD | | 100% | 210.000.000,00 |
| 3.29.01.6.05.2 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | Provinsi Lampung | 7 Laporan | 474.210.000,00 | APBD | | 7 Laporan | 210.000.000,00 |
| 3.29.01.6.06 | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Persentase Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun | | 80% | 350.000.000,00 | APBD | | 100% | 1.504.710.000,00 |
| 3.29.01.6.06.2 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Jumlah Sarana yang terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | Provinsi Lampung | 0 Unit | 0,00 | APBD | | 3 Unit | 1.004.710.000,00 |
| 3.29.01.6.06.4 | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Provinsi Lampung | 3 Laporan | 100.000.000,00 | APBD | | 13 Laporan | 250.000.000,00 |
| 3.29.01.6.06.7 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Jumlah Dokumen yang terkumpul terkait Data Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | Provinsi Lampung | 6 Dokumen | 250.000.000,00 | APBD | | 13 Dokumen | 250.000.000,00 |
| | | | | Jumlah Pagu | 20.838.982.157,90 | | | Jumlah Pagu | 24.639.710.150,00 |



BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

2.9. Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuh Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, dan Target Tahun 2023 serta Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perumusan Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 terdiri dari 5 Program dan 22 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan yang ditekankan pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi menuju lampung berjaya. Program dan kegiatan dimaksud yaitu:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

| Nama Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dari Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI | | | | 20.838.982.157,90 | APBD | | | 24.639.710.150,00 |
| 3.29 | BIDANG URUSAN | | | | | | | | |
| 3.29.01.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan yang ada | | 100% | 16.885.872.157,90 | APBD | | 100% | 17.580.000.150,00 |
| 3.29.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | | 100% | 167.356.000,00 | APBD | | 100% | 275.000.000,00 |
| 3.29.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas ESDM | 12 Dokumen | 16.126.000,00 | APBD | | 22 Dokumen | 125.000.000,00 |
| 3.29.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas ESDM | 3 Dokumen | 116.230.000,00 | APBD | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 |
| 3.29.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas ESDM | 6 Laporan | 35.000.000,00 | APBD | | 3 dokumen | 50.000.000,00 |
| 3.29.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah | | 100% | 13.868.099.842,90 | APBD | | 100% | 13.607.117.685,00 |
| 3.29.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas ESDM | 1582 Org/bulan | 13.857.979.842,90 | APBD | | 1582 Orang/Bulan | 13.577.117.685,00 |
| 3.29.01.1.02.07 | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan | Dinas ESDM | 6 Laporan | 10.120.000,00 | APBD | | 6 Laporan | 30.000.000,00 |
| 3.29.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia | | 100% | 50.000.000,00 | APBD | | 100% | 78.369.550,00 |
| 3.29.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas ESDM | 2 Laporan | 15.000.000,00 | APBD | | 2 Laporan | 25.000.000,00 |
| 3.29.01.1.05.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas ESDM | 7 Laporan | 35.000.000,00 | APBD | | 7 Laporan | 53.369.550,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|-------------------------|
| 3.29.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang ada | | 100% | 100.000.000,00 | APBD | | 100% | 150.000.000,00 |
| 3.29.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Dinas ESDM | 20 orang | 100.000.000,00 | APBD | | 20 Orang | 150.000.000,00 |
| 3.29.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Umum sesuai dengan peraturan yang ada | | 100% | 1.192.597.400,00 | APBD | | 100% | 1.302.052.915,00 |
| 3.29.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | Dinas ESDM | 19 Paket | 15.884.000,00 | APBD | | 30 Paket | 40.884.000,00 |
| 3.29.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Dinas ESDM | 460 Paket | 46.000.000,00 | APBD | | 790 Paket | 97.500.000,00 |
| 3.29.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dinas ESDM | 1 Dokumen | 0,00 | APBD | | 125 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 3.29.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan | Dinas ESDM | 2347 Paket | 168.432.000,00 | APBD | | 2347 Paket | 202.500.000,00 |
| 3.29.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Dinas ESDM | 415 Laporan | 25.775.000,00 | APBD | | 451 Laporan | 35.000.000,00 |
| 3.29.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas ESDM | 148 Laporan | 936.506.400,00 | APBD | | 148 Laporan | 901.168.915,00 |
| 3.29.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100% | 221.480.000,00 | APBD | | 100% | 150.000.000,00 |
| 3.29.01.1.07.05 | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | Dinas ESDM | 31 Paket | 114.214.000,00 | APBD | | 7 unit | 50.000.000,00 |
| 3.29.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | Dinas ESDM | 31 Unit | 107.266.000,00 | APBD | | 8 unit | 100.000.000,00 |
| 3.29.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | | 100% | 724.833.915,00 | APBD | | 100% | 733.060.000,00 |
| 3.29.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Dinas ESDM | 12 Laporan | 197.558.915,00 | APBD | | 12 laporan | 250.800.000,00 |
| 3.29.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Dinas ESDM | 36 Laporan | 527.275.000,00 | APBD | | 36 laporan | 482.260.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------|---------------|-----------------------|-------------|--|-------------|-------------------------|
| 3.29.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100% | 561.505.000,00 | APBD | | 100% | 1.284.400.000,00 |
| 3.29.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dinas ESDM | 6 Unit | 218.080.000,00 | APBD | | 12 Unit | 859.400.000,00 |
| 3.29.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara | Dinas ESDM | 88 Unit | 28.425.000,00 | APBD | | 105 unit | 75.000.000,00 |
| 3.29.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Dinas ESDM | 1 Unit | 315.000.000,00 | APBD | | 3 Unit | 350.000.000,00 |
| 3.29.01.2 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN | Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian | | 56,25% | 600.000.000,00 | APBD | | 100% | 1.070.000.000,00 |
| 3.29.01.2.01 | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Persentase Perusahaan yang Pemanfaat Air tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah | | 67,5% | 480.000.000,00 | APBD | | 100% | 820.000.000,00 |
| 3.29.01.2.01.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Jumlah Dokumen terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam | Provinsi Lampung | 20 Dokumen | 261.500.000,00 | APBD | | 44 Dokumen | 220.000.000,00 |
| 3.29.01.2.01.02 | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah | Jumlah Dokumen Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | 1 Dokumen | 218.500.000,00 | APBD | | 4 Dokumen | 600.000.000,00 |
| 3.29.01.2.03 | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Persentase Progres Penyusunan Pergub tentang NPA | | 45% | 120.000.000,00 | APBD | | 100% | 250.000.000,00 |
| 3.29.01.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | 10 Laporan | 120.000.000,00 | APBD | | 30 Laporan | 250.000.000,00 |

| 3.29.01.3 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara | | 100% | 519.110.000,00 | APBD | | 60% | 750.000.000,00 |
|-----------------|--|---|------------------|------------|----------------|------|--|------------|----------------|
| 3.29.03.1.01 | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | 7 dokumen | 140.000.000,00 | APBD | | 7 dokumen | 315.000.000,00 |
| 3.29.03.1.01.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Provinsi Lampung | 7 dokumen | 140.000.000,00 | APBD | | 7 dokumen | 315.000.000,00 |
| 3.29.03.1.01 | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | | 22 Laporan | 379.110.000,00 | APBD | | 22 Laporan | 435.000.000,00 |
| 3.29.03.1.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Provinsi Lampung | 11 Laporan | 189.110.000,00 | APBD | | 11 Laporan | 210.000.000,00 |
| 3.29.01.3.03.04 | Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | Provinsi Lampung | 11 Laporan | 190.000.000,00 | APBD | | 11 Laporan | 225.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|--|--------------|-------------------------|
| 3.29.01.5 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase Bauran Energi Daerah | | 100% | 1.659.790.000,00 | APBD | | 34,8% | 3.025.000.000,00 |
| 3.29.01.5.03 | Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Persentase Badan Usaha yang diawasi sesuai dengan Kapasitas Penyediaan samapai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per hari | | 8% | 309.000.000,00 | APBD | | 10% | 400.000.000,00 |
| 3.29.01.5.03.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Provinsi Lampung | 12 Laporan | 309.000.000,00 | APBD | | 30 Laporan | 400.000.000,00 |
| 3.29.01.5.04 | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | | 100% | 1.350.790.000,00 | APBD | | 100% | 2.625.000.000,00 |
| 3.29.05.1.04.01 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi | Jumlah Dokumen Data guna Penyusunan Neraca Energi Daerah | Provinsi Lampung | 2 Dokumen | 405.000.000,00 | APBD | | 5 Dokumen | 650.000.000,00 |
| 3.29.05.1.04.03 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi | Jumlah Orang yang menerima manfaat dan teknologi Konservasi Energi | Provinsi Lampung | 300 Orang | 795.000.000,00 | APBD | | 300 Orang | 1.325.000.000,00 |
| 3.29.05.1.04.04 | Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi | Jumlah Penerima Manfaat Fasilitas/Gedung milik Pemerintah yang dilakukan Efisiensi Energi Listrik | Provinsi Lampung | 2 Unit | 150.790.000,00 | APBD | | 4Unit | 650.000.000,00 |
| 3.29.01.6 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Persentase Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi | | 80% | 1.174.210.000,00 | APBD | | 100% | 2.214.710.000,00 |
| 3.29.01.6.01 | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang terawasi | | 80% | 250.000.000,00 | APBD | | 100% | 350.000.000,00 |
| 3.29.01.6.01.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | 21 Laporan | 250.000.000,00 | APBD | | 8 Laporan | 350.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|--------------------|--------------------------|------|--|--------------------|--------------------------|
| 3.29.01.6.02 | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Persentase Izin Operasi yang terawasi se Provinsi Lampung | | 80% | 100.000.000,00 | APBD | | 100% | 150.000.000,00 |
| 3.29.01.6.02.02 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Provinsi Lampung | 12 Laporan | 100.000.000,00 | APBD | | 12 Laporan | 150.000.000,00 |
| 3.29.01.6.05 | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | Persentase Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun | | 80% | 474.210.000,00 | APBD | | 100% | 210.000.000,00 |
| 3.29.01.6.05.2 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | Provinsi Lampung | 7 Laporan | 474.210.000,00 | APBD | | 7 Laporan | 210.000.000,00 |
| 3.29.01.6.06 | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Persentase Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan yang teranggarkan selama 1 Tahun | | 80% | 350.000.000,00 | APBD | | 100% | 1.504.710.000,00 |
| 3.29.01.6.06.2 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Jumlah Sarana yang terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | Provinsi Lampung | 0 Unit | 0,00 | APBD | | 3 Unit | 1.004.710.000,00 |
| 3.29.01.6.06.4 | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Provinsi Lampung | 3 Laporan | 100.000.000,00 | APBD | | 13 Laporan | 250.000.000,00 |
| 3.29.01.6.06.7 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan | Jumlah Dokumen yang terkumpul terkait Data Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan | Provinsi Lampung | 6 Dokumen | 250.000.000,00 | APBD | | 13 Dokumen | 250.000.000,00 |
| | | | | Jumlah Pagu | 20.838.982.157,90 | | | Jumlah Pagu | 24.639.710.150,00 |

BAB V

PENUTUP

Program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2023 disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi saat ini yang diarahkan pada upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung berjaya.

Dengan adanya Renja ini diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat memacu kinerja seluruh personil/pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, selain itu dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban terhadap tupoksi mengarah pada objektifitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja.

Demikian Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2023 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Lampung,



Drs. HERY SADLI, M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19690719 199003 1 005